

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 pengganti UU Nomor 22 tahun 1999 menjelaskan pemberian otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Begitu pula dalam organisasi sektor publik yang dituntut untuk memberikan pelayanan kepada publik. Di dalam suatu organisasi, pasti mempunyai visi dan misi. Visi dan misi bisa diibaratkan sebagai fondasi untuk mencapai tingkat keberhasilan dari sebuah organisasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Visi dan misi tersebut akan menjadikan patokan untuk membuat suatu rencana kegiatan beserta anggarannya. Dimana jika sebuah rencana itu berhasil atau sukses, maka kinerja dari suatu organisasi tersebut bisa dikatakan baik. Begitu juga sebaliknya jika kurang berhasil, maka kinerjanya kurang baik.

Merencanakan suatu kegiatan memang mudah, tetapi untuk mengaplikasikannya dalam bentuk kegiatan yang nyata itu tidak mudah. Karena dibutuhkan anggaran yakni sebagai pendukung agar kegiatan-kegiatan dapat terlaksana. Karena jika kegiatan terlaksana dengan baik diharapkan membuahkan hasil maksimal yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, maka harus disikapi dengan serius perencanaan dan penganggarannya.

Ditinjau dari manajemen strategis, perencanaan dan penganggaran daerah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam fungsi manajemen (Yuwono, dkk dalam Rasyid, 2009). Oleh karena itu perencanaan yang baik merupakan inti dari pengelolaan keuangan yang efektif. Adapun

dokumen perencanaan tahunan daerah yang wajib disusun setiap tahunnya adalah Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja-SKPD). Dalam penyusunannya yang melibatkan antara Pemerintah, DPRD, masing-masing SKPD dan pemangku kepentingan lain, serta masyarakat dalam musrenbang tahunan. Kedua dokumen perencanaan tersebut memiliki hubungan keterkaitan yang kemudian berproses sampai pada penyusunan anggaran. Pelibatan masyarakat juga menjadi peran penting dalam proses penyusunan rencana kegiatan yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yakni masyarakat sebagai objek yang akan menerima hasil dari program kegiatan yang dilaksanakan. Pemerintah Daerah tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran yang dimiliki tidak baik.

Perencanaan dan penganggaran merupakan dua hal yang erat kaitannya. Agar perencanaan dan penganggaran dapat tepat sasaran maka perlu didukung oleh Peraturan Pemerintah yang menjabarkan konsep dan ketentuan mengenai kerangka rencana dan anggaran. Yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa perencana cenderung mengabaikan dokumen-dokumen dalam perencanaan dan penganggaran serta tidak adanya keterkaitan atau sinkronisasi antar dokumen. Akibat yang mungkin bisa terjadi adalah kurang optimalnya pelaksanaan proses pembangunan dan bahkan sasaran yang dituju dapat tidak terlaksana sama sekali.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Proses Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja-SKPD) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2015”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka dalam penulisan ini merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana proses penyusunan RKPD dan Renja-SKPD di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2015 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

Untuk mengetahui proses penyusunan RKPD dan Renja-SKPD di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan adalah :

1. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat menjadi bahan-bahan referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya yang sejenis yang berhubungan dengan proses penyusunan RKPD dan Renja-SKPD.
2. Bagi penulis, untuk memperluas dan memperdalam wawasan penulis yang berhubungan dengan proses penyusunan dokumen RKPD dan Renja-SKPD.
3. Memberikan sumbangan pemikiran sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi mahasiswa yang akan menghadapi tugas akhir dan skripsi.

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

1.5.1 Waktu Penelitian

Penulis melakukan magang pada tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan 13 Februari 2015. Sedangkan pengumpulan data juga dilakukan diluar waktu tersebut sampai dengan tanggal 25 Februari 2015.

1.5.2 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang berlokasi di Jalan Halim Perdana Kusuma nomor:7 Bangkalan.